



Pemetaan dan Penyuluhan tentang Ketidakmerataan Akses Layanan Bantuan Sosial di Babau

Mapping and Counseling on Inequality of Access to Social Assistance Services in Babau

Siti Dea Ananda

STIQ YPIQ Baubau, Indonesia

Article History:

Received: Februari 14, 2022;

Revised: Februari 28, 2022;

Accepted: Maret 17, 2022;

Published: Maret 31, 2022;

Keywords: *Baubau; Counseling; Mapping; Social Assistance Services*

Abstract. *Inequality of access to social assistance services is still a sectoral problem faced in various regions including Baubau. Although the local government has carried out policy masculinization, in reality it still faces a variety of obstacles oriented towards biased access to social assistance services in the community. This study aims to further explore the alleged inequality and or inequality of access to social assistance services in Baubau. There are at least three important questions raised in this research. First, what is the reality of the implementation of social assistance services in Baubau? Second, what are the factors behind the inequality of access to social assistance services? Third, how is the mapping and counseling of bias in access to social assistance services in Baubau. In dissecting these questions, this research uses a descriptive-qualitative method with a critical paradigm. The data analysis process in this case uses the offer of Matthew B. Miles and Michael Haberman. The findings in this article show that the implementation of social assistance services in Baubau still faces many challenges oriented towards two main aspects, namely the issue of beneficiary data (data freshness and Ineligible data) and community accessibility issues. These two points are the main starting point for inequality in access to social assistance services in Baubau, which can technically be categorized into two major classifications, namely bias (Inequality) between urban (urban) and rural (rural) areas. With the extension activities, this problem is expected to be minimized for the sake of more solitive and adaptive social assistance governance.*

Abstrak

Ketidakmerataan akses layanan bantuan sosial masih menjadi persoalan sektoral yang dihadapi di berbagai daerah termasuk Baubau. Meskipun pemerintah setempat telah melakukan maskisimalisasi kebijakan, dalam realitanya tetap menghadapi ragam kendala yang berorientasi pada bias akses layanan bantuan sosial di masyarakat. Studi ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi lebih jauh terkait dugaan adanya ketimpangan dan atau ketidakmerataan akses layanan bantuan sosial di Baubau. Setidaknya terdapat tiga pertanyaan penting yang diajukan dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana realitas pelaksanaan layanan bantuan di Baubau? Kedua, faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan akses layanan bantuan sosial? Ketiga, bagaimana pemetaan dan penyuluhan atas bias akses layanan bantuan sosial di Baubau. Dalam membedah pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan paradigma kritis. Proses Analisis data dalam hal ini menggunakan tawaran Matthew B. Miles dan Michael Haberman. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa pelaksanaan layanan bantuan sosial di Baubau masih menghadapi banyak tantangan yang berorientasi pada dua aspek utama yakni persoalan data penerima bantuan (*data freshness* dan *Ineligible data*) dan masalah aksesibilitas masyarakat terhadap program bantuan sosial. Kedua poin ini menjadi titik tolak utama terjadinya ketimpangan akses layanan bantuan sosial di Baubau yang secara teknis dapat dikategorisasikan dalam dua klasifikasi besar yakni bias (*Inequality*) antara wilayah perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*). Dengan adanya kegiatan penyuluhan, persoalan ini diharapkan dapat diminimalisir demi tata kelola bantuan sosial yang lebih solitif dan adaptif.

Kata Kunci: Baubau; Layanan Bantuan Sosial; Pemetaan; Penyuluhan

1. PENDAHULUAN

Ketimpangan akses terhadap layanan bantuan sosial masih menjadi persoalan sektoral yang dihadapi di berbagai daerah, termasuk di Kota Baubau. Program-program bantuan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali tidak menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata (Barrientos, 2019; Cahyadi et al., 2020). Masalah ini menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan sosial, di mana masyarakat yang membutuhkan justru kerap menghadapi hambatan untuk memperoleh hak mereka.

Beberapa faktor penyebab ketimpangan akses tersebut antara lain adalah keterbatasan informasi, kendala administratif, serta bias dalam pemahaman prosedural (Mufida, 2021; Nugroho et al., 2021; Zakiyah et al., 2020). Ardiansyah dan rekan-rekannya (2022, hlm. 33) mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama masih tingginya angka kemiskinan di Baubau adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan saluran akses layanan bantuan sosial. Hal ini diperkuat oleh temuan Majid dan Dewi (2022, hlm. 86), yang menunjukkan bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masih menemui banyak kendala, khususnya dalam aspek komunikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

Hingga saat ini, kajian-kajian yang ada terkait bantuan sosial di Baubau masih cenderung terbatas pada program tertentu saja. Terdapat tiga kecenderungan pola studi sebelumnya: pertama, penelitian yang berfokus pada layanan bantuan sosial PKH (Majid & Dewi, 2022; Basir et al., 2022); kedua, studi evaluatif terhadap peran Dinas Sosial Kota Baubau (Asrin et al., 2022; Zahimu, 2018); dan ketiga, kajian yang mengaitkan bantuan sosial dengan sektor pendidikan dan kesehatan (Mau et al., 2019; Taufiq et al., 2021). Meskipun bermanfaat, studi-studi tersebut belum menyentuh aspek pemetaan ketimpangan secara menyeluruh maupun pendekatan penyuluhan yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan demikian, terdapat ruang kosong dalam kajian akademik terkait ketimpangan akses layanan bantuan sosial di Baubau yang perlu diisi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan eksploratif yang bertujuan untuk menganalisis ragam kasus ketimpangan, serta mengembangkan strategi pemetaan dan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Secara khusus, studi ini akan menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana pelaksanaan layanan bantuan sosial di Kota Baubau? (2) Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan akses terhadap layanan bantuan sosial? dan (3) Bagaimana bentuk pemetaan dan penyuluhan yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan tersebut? Ketiga pertanyaan ini menjadi dasar arah penelitian yang diharapkan

dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan layanan bantuan sosial yang lebih inklusif dan merata.

2. METODE

Penelitian tentang pemetaan dan penyuluhan kasus ketimpangan akses layanan bantuan sosial di Baubau dipilih dengan berdasar pada kompleksitas isu dan abainya perhatian keserjanaan. Melihat keterlibatan informasi subyek penelitian, tulisan ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan paradigma kritis(Sugiyono, 2019). Sebagaimana tema yang dipilih, subyek penelitian yang akan mewarnai diskusi dalam tulisan ini ialah mereka yang terlibat dalam pelaksanaan layanan bantuan sosial dan masyarakat Baubau secara umum. Untuk memudahkan proses penelitian, penulis hanya mengambil beberapa sample data lapangan yang paling representative dengan menggunakan metode *purposive sampling* (Etikan, 2016).

Studi ini bersumber dari dua sumber data uatama yakni sumber primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Baubau dan website resmi dinas sosial dan dinas terkait. Sementara data sekuder ialah data-data hasil penelitian lain yang relevean baik itu berupa artikel jural, buku-buku, tesis dan disertasi. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis menggunakan tiga alur secara bersamaan yang ditawarkan oleh Matthew B. Miles dan Michael Haberman yakni reduksi data, visulaisasi data dan verifikasi data(Miles et al., 2014). Reduksi data ialah menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mengabstraksikan hasil wawancara dan narasi postingan dinas sosial. Setelah proses pemilihan data, tahap selanjutnya adalah visualisasi data sebelum disusun, disortir dan dirangkai untuk kemudian membuat kedimpulan yang memungkinkan.

3. HASIL

Pemetaan dan penyuluhan atas kasus ketidakmerataan akses layanan bantuan sosial yang terjadi di Baubau akan dijelaskan pada bagian ini. Penjelasan atas hal ini akan dijabarkan dalam tiga bentuk yang sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. *Pertama*, deskripsi tentang pelaksanaan layanan bantuan sosial di Baubau. *Kedua*, hasil analisis atas faktor yang melatarbelakangi terjadinya ketimpangan akses layanan bantuan Sosial di Baubau. *Ketiga*, pemetaan dan penyuluhan atas ketipangan akses layanan bantuan sosial pada masyarakat Baubau.

Pelaksanaan Layanan Bantuan Sosial di Baubau; Tantangan dan Realitas di Lapangan

Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melaksanakan berbagai bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan mendukung kelompok rentan. Dalam pelaksanaannya, setiap daerah memiliki dinamika tersendiri untuk menunjang efektivitasnya (Djulius et al., 2022). Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 01 tahun 2019 bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Rasta, dan PIP (Nainah et al., 2022). Masing-masing dari jenis bantuan tersebut dalam pelaksanaannya mendapat respons yang beragam dari berbagai lapisan masyarakat di Indonesia terutama masalah pemerataan dan ketepatan sasaran bantuan. Dalam realitasnya, terdapat ragam kasus ketimpangan pemberian bantuan sosial yang ditandai dengan adanya orang-orang yang tidak memenuhi syarat justru mendapatkan bantuan dan yang memenuhi syarat malah tidak.

Realitas pelaksanaan bantuan sosial dengan ragam problematikanya juga ditemukan di Baubau yang dihadapkan pada sejumlah tantangan di lapangan. Meskipun pemerintah daerah setempat telah mengupayakan kebijakan terbaik untuk pemerataan, tetap saja mendapat banyak tantangan, terutama dalam aspek distribusi dan keterjangkauan layanan. Tantangan utama yang dihadapi mencakup persoalan administrative, validitas data dan kurangnya pengetahuan masyarakat lokal tentang layanan bantuan sosial dari pemerintah. Misalnya, dalam beberapa kasus ditemukan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili namun masih tercatat sebagai penerima aktif. Di sisi lain, warga miskin yang memenuhi syarat justru belum pernah menerima bantuan karena kurangnya pengetahuan dan data diri yang belum masuk di sistem (Ardiansyah et al., 2022; Majid & Dewi, 2022). Hal ini terjadi di setiap jenis layanan bantuan sosial yang ada di Baubau seperti PKH, BPNT, KIP dan lainnya.

Disintegrasi data dan bias pengetahuan masyarakat dominan terjadi dalam pelaksanaan layanan Program Keluarga Harapan (PKH) di Baubau. Hal ini tampak jelas dalam beberapa hasil riset kesarjanaan dan fakta yang ada di lapangan. Sebagai contoh di wilayah perkotaan Baubau (kecamatan Kokalukuna), yang dalam pelaksanaannya ditemukan fakta ketidaktepatan sasaran yang disebabkan oleh inakurasi data. Menurut Alnamira, dkk pemerintah setempat perlu melakukan pembaharuan data untuk diserahkan ke pusat (Alnamira et al., 2022, p. 173). Selain itu, juga ditemukan adanya inefektivitas penggunaan bantuan dengan tidak ditemukannya fakta kemandirian keluarga yang menerima bantuan khususnya di kecamatan Walio. Dalam tinjauannya yang lebih luas, Majid dan Dewi menjabarkan bahwa implementasi kebijakan PKH di kota Baubau masih mendapati banyak masalah dari aspek komunikasi dan sosialisasi pelaksanaan. Di antara misinformasi yang kerap terjadi di lapangan ialah masalah

penjadwalan, pengurangan dan penambahan daftar keluarga yang menerima bantuan (Majid & Dewi, 2022, p. 86).

Miskonsepsi fungsi bantuan dan penjadwalan sebagai akibat dari kurangnya sosialisasi di masyarakat juga ditemukan pada jenis Bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) di Baubau. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua tipologi ketimpangan. Pertama, masyarakat yang telah menerima bantuan tapi tidak mengetahui tujuan distribusi bantuan. Kedua, masyarakat yang tidak mengetahui jenis bantuan BPNT di Baubau. Hal ini tampak jelas dalam hasil evaluasi distribusi bantuan BPNT di Kelurahan Baadia kota Baubau. Menurut Asrin,dkk, distribusi BPNT di kelurahan Baadia masih terbilang kurang maksimal dengan fakta lapangan yang belum mampu menangani kemiskinan bahkan kuantitasnya justru semakin bertambah(Asrin et al., 2022). Monitoring dan evaluasi dari pemerintah setempat melalui survei lapangan dalam hal ini dibutuhkan untuk maksimalisasi distribusi bantuan sosial.

Berbeda dari beberapa pelaksanaan bantuan sosial di atas, dalam proses distribusi BSPS (Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan PIP (Program Indonesia Pintar) di Baubau cenderung lebih positifistik. Hara dalam penelitiannya yang dilakukan di Kelurahan Lowulowu Kecamatan Laelae menegaskan bahwa, Program BSPS berdampak secara signifikan dengan fakta lapangan yang membawa banyak perubahan di masyarakat setempat (Program et al., 2019). Begitupun dengan PIP yang tampak jelas dalam hasil evaluasi yang dilakukan oleh Zahimu melalui risetnya dengan hasil yang mengklaim bahwa program ini telah berjalan dengan baik serta berdampak signifikan terhadap penerima bantuan (Zahimu, 2018). Klaim Zahimu dibuktikan melalui persentase total penerima PIP melalui KIP sepanjang tahun 2017.

Inakurasi Data dan Inaksesibilitas Masyarakat Terhadap Program Pemerintah

Hasil pemetaan data (literature dan lapangan) mengungkapkan bahwa ketidakmerataan akses terhadap layanan bantuan sosial di Baubau dipengaruhi secara signifikan oleh dua faktor utama. *Pertama*, inakurasi data penerima bantuan yang menyebabkan distribusi bantuan menjadi tidak tepat sasaran. *Kedua*, inaksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan mekanisme program pemerintah yang mengakibatkan beberapa golongan masyarakat tidak mengetahui hak, penjadwalan dan prosedur untuk mengakses ragam bantuan yang ada.

Temuan adanya inakurasi data pada beberapa jenis bantuan sosial berorientasi pada persoalan update tidaknya data (*data freshness*) dan pantas tidaknya data (*Ineligible data*). Kedua aspek ini menyebabkan sebagian besar data yang digunakan dalam distribusi bantuan sosial di Baubau tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual. Proses

penyaluran bantuan PKH di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro misalnya, masih banyak masyarakat yang semestinya masuk dalam kriteria sebagai penerima PKH tapi belum mendapatkan bantuan. Sebaliknya yang tidak memenuhi syarat justru menerima PKH. Kondisi ini menurut Majid dan Dewi disebabkan oleh *data freshness* yang dijadikan rujukan dalam distribusi PKH dari yang seharusnya di *update* malah masih menggunakan data tahun 2013 sampai 2021 (Majid & Dewi, 2022). Hal yang sama juga terjadi di kelurahan Kadolomoko kecamatan Kokalukuna, ditemukan adanya *ineligible data* dalam distribusi bantuan sosial (Alnamira et al., 2022).

Selain persoalan data, inaksesibilitas masyarakat terhadap informasi program juga menjadi penyebab signifikan terjadinya ketimpangan. Meskipun pemerintah setempat telah meluncurkan berbagai program bantuan sosial—sebagaimana amanat peraturan Dinas Sosial RI—untuk mengurangi kemiskinan, ternyata tidak semua yang membutuhkan mampu mengakses informasi untuk mendapatkan berbagai bantuan yang ada (Grosh et al., 2022). Akar persoalan dari inaksesibilitas ini terletak pada ketimpangan distribusi informasi karena keberadaan mitra penyaluran bantuan sosial di beberapa daerah pedesaan yang masih terbilang sangat minim sehingga pelaksanaan sosialisasi program belum merata secara menyeluruh. Minimnya pengetahuan beberapa kelompok masyarakat akan ragam program bantuan sosial menjadi bukti atas hal ini (Ardiansyah et al., 2022). Realitas ini diperparah dengan keterbatasan akses terhadap media informasi, keterbatasan jaringan internet, dan rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat berpendidikan rendah (Saksono et al., 2020). Hal ini menyebabkan sebagian besar warga yang sebenarnya layak menerima bantuan, tidak terdaftar sebagai penerima karena mereka tidak tahu prosedur pendaftaran atau mekanisme pengajuan yang berlaku.

Kondisi inaksesibilitas ini bukan hanya berdampak pada ketidaktepatan sasaran, tetapi juga menciptakan ketimpangan baru dalam proses penyaluran bantuan sosial. Bantuan cenderung terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau oleh pemerintah, sementara masyarakat yang jauh dari pusat perkotaan cenderung tertinggal dalam sistem distribusi bantuan. Hal ini tampak jelas dalam persentase peningkatan penerima bantuan sosial dari tahun 2018 hingga 2021. Dalam publikasi badan pusat statistik kota Baubau tampak jelas perbedaan yang signifikan jumlah peningkatan penerima bantuan antara daerah kecamatan yang jauh dari ibu kota dan yang dekat. Yang dekat dengan pusat kota cenderung mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, sementara yang jauh persentase peningkatannya cenderung minim (Baubau, 2020, 2022). Keadaan ini memperjelas bahwa perbedaan akses informasi dan pelayanan menjadi faktor krusial dalam menciptakan

ketidakmerataan bantuan sosial di Baubau.

Ketimpangan (*Inequality*) Akses Layanan Antara Zona Perkotaan dan Pedesaan

Berdasarkan hasil observasi dan keberadaan data lapangan, ditemukan dua klasifikasi besar tentang ketimpangan akses layanan bantuan sosial di Baubau. Dua klasifikasi ini tidak jauh berbeda dengan polemik yang terjadi di berbagai sektor lain, yakni *inequality* antara zona *urban* dan *rural*. Distingsi jumlah mitra penyaluran bantuan menjadi antara dua zona tersebut menjadi titik tolak utama terjadinya ketimpangan. Kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah urban dalam hal ini cenderung memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi distribusi bantuan sosial. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di zona rural cenderung lebih sulit untuk mengakses informasi layanan. Realitas ini menyebabkan pola penyaluran bantuan sosial secara general cenderung terfokuskan di wilayah-wilayah yang dekat dengan pusat perkotaan.

Bias akses layanan bantuan sosial antara zona perkotaan dan pedesaan dapat dilihat dalam laporan Badan Pusat Statistik Kota Baubau. Dari delapan kecamatan yang ada di Baubau, setidaknya terdapat empat daerah kecamatan yang dekat dengan pusat pemerintahan ibu kota yakni Betoambari dengan jarak 1,5; Muruhum 4,5; Batupoaro 6,2; Walilo 6,4. Adapun yang cenderung jauh dari ibu kota yakni Bungi dengan jarak 21,0; Lea-Lea 23,6; Sorowali 18,71 dan Kolakuna 13,3. Pemetaan jarak dengan ibu kota ini berkesinambungan dengan perbedaan kuantitas peningkatan bantuan sosial dari tahun ke tahun (2018-2022). Berikut penulis lampirkan kolom jumlah penerima bantuan sosial dari Badan Pusat Statistik Kota Baubau.

Table 1: Jumlah Penerima Bantuan Sosial Kepala Keluarga Menurut Kecamatan di Kota Baubau, 2018 sampai 2021

Kecamatan	2018	2019	2020	2021
	Jumlah kepala keluarga	Jumlah kepala keluarga	Jumlah kepala keluarga	Jumlah kepala keluarga
Betoambari	1002	1071	1704	1463
Murhum	442	547	816	700
Batupoaro	790	824	1486	1266
Walio	1329	1356	2088	1838
Kokalukuna	994	1054	1527	1327
Sorowali	814	833	1081	942
Bungi	685	709	909	811
Lealea	681	751	1041	941
Baubau	6737	7010	10652	9288

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Baubau.com

Tabel 1 di atas menyajikan data jumlah penerima bantuan kepala keluarga dan anggaran bantuan sosial pangan di Kota Baubau dari tahun 2018 hingga 2021. Dari data tersebut, terlihat adanya peningkatan jumlah penerima bantuan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah total penerima bantuan di seluruh kecamatan adalah 7.080 kepala keluarga. Jumlah ini meningkat menjadi 7.610 pada tahun 2019, kemudian melonjak signifikan menjadi 10.652 pada tahun 2020—kemungkinan besar sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mendorong pemerintah memperluas jangkauan bansos. Namun, pada tahun 2021, jumlah ini mengalami sedikit penurunan menjadi 9.288 kepala keluarga.

Dalam tinjauan yang lebih spesifik, tampak jelas perbedaan signifikan jumlah penerima bantuan sosial antar kecamatan di kota Baubau. Perbedaan ini tidak terlepas dari dua masalah yang disebutkan sebelumnya (terutama masalah aksesibilitas masyarakat). Misalnya, Kecamatan Betoambari secara konsisten mencatat jumlah penerima tertinggi setiap tahun, dari 1.002 penerima pada 2018 menjadi 1.463 pada 2021. Sebaliknya, Kecamatan Bungi dan Sorawolio, yang termasuk wilayah pinggiran, memiliki jumlah penerima lebih rendah: Bungi dari 610 (2018) ke 811 (2021), dan Sorawolio dari 685 ke 914 dalam periode yang sama. Hal ini menunjukkan pola distribusi bantuan lebih terkonsentrasi di pusat kota yang aksesibilitasnya lebih mudah dibanding wilayah yang jauh dari pusat kota.

4. DISKUSI

Studi ini telah menyelidiki ketimpangan akses layanan bantuan sosial yang terjadi di Baubau yang difokuskan pada tiga isu utama. *Pertama*, menyoal realitas dan tantangan distribusi ragam bantuan sosial di Baubau. Ditemukan bahwa, secara umum akses layanan bantuan-bantuan sosial di Baubau masih mengalami banyak kendala seperti masalah data, sosialisasi program dan efektivitasnya terutama pada PKH dan BNPT. Adapun yang cenderung positifistik ditemukan di BPS dan PIP. *Kedua*, penelusuran atas penyebab terjadinya ketimpangan yang mendapati masalah aksesibilitas dan akurasi data sebagai titik tolak utamanya. *Ketiga*, pemetaan atas ketimpangan/ketidakmerataan akses layanan bantuan sosial yang berorientasi pada dua klasifikasi besar yakni bias antara zona *urban* dan *rural*. Ketiga hasil temuan ini saling berkesinambungan satu sama lain secara linear yang dapat disimpulkan dalam satu narasi bahwa, terjadinya bias atau ketidakmerataan akses layanan bantuan sosial disebabkan oleh lemahnya sistem pendataan dan distribusi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial masyarakat Baubau.

Ketidakmerataan akses layanan bantuan sosial di Baubau sebagaimana teridentifikasi dalam studi ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan struktural yang lebih luas yakni sistem

tata kelola data (pusat-daerah) dan bias aktualisasi kebijakan. Ketika distribusi bantuan sosial masih bergantung pada data yang tidak akurat dan tidak mutakhir, maka kecenderungan terjadinya bias dalam penyaluran—terutama antara wilayah urban dan rural—akan terus terjadi. Fenomena ini sebetulnya juga dialami oleh berbagai daerah yang lain sebagaimana dalam publikasi laporan Omdudisman RI terkait problematika bantuan sosial dan DTKS di Indonesia (Ombudsman RI, 2021). Menurut data, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial di beberapa daerah di Indonesia yakni; keberadaan mitra penyaluran bantuan sosial yang tidak merata di sejumlah desa (Junaedi et al., 2021); alur pendaftaran calon penerima bantuan yang terbilang rumit karena keterbatasan anggaran serta kompetensi SDM (Nugroho et al., 2021); dan sosialisasi bantuan yang masih minim (Rulandari et al., 2022). Beberapa persoalan tersebut menjadi masalah yang bersifat struktural yang juga terjadi di Baubau.

Temuan studi ini pada satu sisi sejalan dengan riset sebelumnya namun pada sisi yang lain juga menyimpan perbedaan yang signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Alnamira, dkk misalnya yang juga mendapati adanya ketimpangan penyaluran bantuan PKH karena persoalan data. Kemudian, riset Abdul Majid dan Dewi; Destiani, dkk yang mendapati persoalan sosialisasi sebagai penyebab terjadinya ketimpangan distribusi bantuan sosial (Destiani et al., n.d.; Majid & Dewi, 2022). Beberapa riset ini sejalan dengan temuan penulis namun belum sampai pada upaya pemetaan adanya ketimpangan bantuan sosial di Baubau dalam tinjauan yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, kesarjanaan sebelumnya belum menyadari dua klasifikasi besar akan ragam ketimpangan yang terjadi di baubau yakni bias antara akses layanan di zona *urban* dan *rural*. Temuan ini sekaligus menjadi pembeda dari riset yang telah ada sebagai poin kebaruan riset ilmiah. Kesadaran akan perbedaan dua zona wilayah (Ischak, 2018) ini dalam hal distribusi bantuan sosial menjadi penting untuk diperhatikan dalam upaya pengetasan kesmiskinan di Inesia. Hal ini sejalan dengan beberapa hasil riset seperti dalam karya Zulfan Tadjoeeddin, Ronghua dan lainnya (Tadjoeeddin, 2019; Xu et al., 2022).

Dalam kerangka interpretatif, bias akses layanan bantuan sosial ini dapat dilihat sebagai fenomena sosial yang dapat diukur, dianalisis, dan diperbaiki melalui intervensi berbasis data dan sistem. Meskipun terdapat sejumlah kendala dalam pendistribusian bantuan—seperti masalah data dan sosialisasi program—lantas tidak seharusnya direspons secara pesimistik melainkan secara optimistic dengan membuka ruang perbaikan yang lebih terarah (Hasmin, 2011; Mudana, 2020; Setiawan & Nawangsari, 2023). Temuan mengenai keberhasilan relatif program seperti BPSP dan PIP memberikan indikasi bahwa dengan sistem yang lebih

terstruktur, pembaruan data yang konsisten, serta koordinasi lintas lembaga yang kuat, efektivitas layanan bantuan sosial dapat meningkat secara signifikan. Pendekatan ini memosisikan ketimpangan bukan sebagai bentuk kegagalan mutlak, melainkan sebagai tantangan administratif yang dapat diatasi melalui penguatan sistem informasi sosial, digitalisasi data penerima manfaat, serta peningkatan kapasitas aparatur pelaksana di lapangan.

Perbaikan sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial di Baubau memiliki implikasi besar terhadap peningkatan keadilan sosial dan efektivitas program bantuan pemerintah. Sebab, sistem yang akurat dan responsif memungkinkan identifikasi penerima manfaat secara lebih tepat dan menjamin bahwa bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan, tanpa terhambat oleh bias administratif atau geografis. Hal ini terbukti dengan keberhasilan beberapa program bantuan sosial sebagaimana dalam poin hasil penelitian. Dengan demikian, implikasi dari temuan ini menekankan bahwa pembangunan system sosial yang berbasis data mutakhir, konsektivitas antar lembaga dan peningkatan sumber daya merupakan kunci utama untuk mewujudkan tata Kelola bantuan sosial yang adil dan merata. Penerapan poin ini secara konsisten saat yang sama dapat direplikasi di daerah lain untuk mengatasi ketimpangan sosial secara sistematis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, persoalan aksesibilitas dan validitas data penerima (*data freshness* dan *Ineligible data*) menjadi penyebab utama terjadinya bias akses layanan bantuan sosial di kota Baubau. Ketimpangan yang terjadi dalam hal ini dapat dikategorisasikan dalam dua kalsifikasi besar yakni *inequality* antara wilayah *urban* dan *rural*. Wilayah yang termasuk zona *rural* cenderung tertinggal dalam hal distribusi informasi sebagai akibat dari terbatasnya akses informasi dan keterlibatan actor/mitra dalam proses verifikasi data dan penyaluran bantuan sosial. Sebaliknya, wilayah *urban* memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan akses karena kedekatan dengan pusat administrasi dan kelengkapan sarana digital. Hal ini mempertegas pentingnya penguatan sistem pendataan yang inklusif dan adaptif terhadap karakteristik geografis, sehingga distribusi bantuan tidak hanya mengandalkan prosedur administratif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan spasial sebagai bagian dari strategi pemerataan kesejahteraan sosial.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat secara aktif dalam proses penelitian, penulisan dan publikasi riset ini. Secara khusus

penulis ucapkan terima kasih pada pihak kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YPIQ Baubau yang telah memberi bantuan dan *support* selama pelaksanaan penelitian. Kemudian, kepada segenap masyarakat Baubau yang terlibat secara aktif dalam proses observasi dan pengumpulan data.

Karena tulisan ini cenderung hanya focus pada upaya eksploratif yang tampak di lapangan dan memiliki keterbatasan, maka tentu masih memuat banyak keterbatasan studi. Keterbatasan ini meniscayakan perlunya penelitian lanjutan yang mengkaji misalnya aspek-aspek yang tidak nampak di lapangan seperti politisasi bantuan sosial dan sejenisnya. Selain itu juga dapat mengkaji secara khusus terkait dampak-dampak yang diakibatkan oleh kesenjangan yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Baubau. Dengan kata lain, isu yang penulis angkat dalam penelitian ini masih sangat terbuka untuk dieksplorasi lebih lanjut,

DAFTAR REFERENSI

- Alnamira, Basir, A., & Gazalin, J. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Kadolomoko Kecamatan Kokalukuna Kota Baubau. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 172–186. <https://doi.org/10.35329/MITZAL.V7I2.3652>
- Ardiansyah, Reani, I., Harfiani, & Asria. (2022). Pemetaan dan penyuluhan tentang kemiskinan perkotaan di Baubau. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Sejahtera*, 1(2), 32–38. <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jpmis/article/view/2173>
- Asrin, A., Nur Achmad, F. Y., & Sadat, A. (2022). Evaluasi kebijakan program bantuan pangan non tunai pada keluarga miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 7(2), 108. <https://doi.org/10.35329/mitzal.v7i2.3179>
- Badan Pusat Statistik Kota Baubau. (2020). Kota Baubau dalam angka 2020. <https://baubaukota.bps.go.id/id/publication/2020/04/27/8526584e7896fa00f654b88d/kota-baubau-dalam-angka-2020.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Baubau. (2022). Kota Baubau dalam angka 2022. <https://baubaukota.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/95ab446c3523910e6db4cd1d/kota-baubau-dalam-angka-2022.html>
- Barrientos, A. (2019). The role of social assistance in reducing poverty and inequality in Asia and the Pacific (ADB Sustainable Development Working Paper Series No. 62). Asian Development Bank. www.adb.org
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110. <https://doi.org/10.1257/pol.20190245>

- Darmin, L. O. D. P., Jasir B., J. B., & Ilham, I. (2023). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintah Kelurahan Bukit Wolio Indah Kecamatan Wolio Kota Baubau. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(1), 119–129. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v12i1.1939>
- Dj Julius, H., Lixian, X., Lestari, A. N., & Eryanto, S. F. (2022). The impact of a poor family assistance program on human development in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 11(4), 59–70.
- Etikan, I. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Grosh, M., Leite, P., Wai-Poi, M., & Emil, T. (2022). Revisiting targeting in social assistance: A new look at old dilemmas. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1814-1>
- Hasmin, H. (2011). Kemiskinan dan solusi pengentasan kemiskinan perkotaan di Indonesia. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 8(4), 415–426.
- Ischak, M. (2018). Peran place identity dalam menciptakan community resilience di wilayah urban fringe. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 1(2), 77. <https://doi.org/10.17509/jaz.v1i2.12254>
- Junaedi, D., Lindawati, L., & Alfiatun, A. (2021). Analisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat di Desa Alassumur Lor Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora*, 2(3), 342–347. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.2838>
- Majid, A., & Dewi, F. (2022). Implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 2(3), 86–95. <https://doi.org/10.51577/IJIPUBLICATION.V2I3.328>
- Mau, M., Tahara, T., Musran, M., Yusniar, & Marsudi. (2019). Quality of public services in education, health, transportation, licensing service and administration of population. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 2(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.
- Mudana, I. W. (2020). Kolaborasi masyarakat ekonomi, politik, dan sipil dalam pengembangan pariwisata bahari untuk pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Bali. *Candra Sangkala*, 1(2). <https://doi.org/10.23887/jcs.v1i2.28764>
- Mufida, N. (2021). Efektivitas bantuan sosial tunai di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. *Jurnal Sosial Sains*, 1(2), 82–92. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i2.23>
- Nainah, E., Raharja, R. M., Hijriyana, S. P., Khairunisa, N., Ayu, S., Pasaribu, E., ... & Yulistian. (2022). Analisis pengelolaan dana bantuan sosial tunai di Kota Bandung. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1277.

- Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., & Marlina, I. (2021). Poverty eradication programs in Indonesia: Progress, challenges and reforms. *Journal of Policy Modeling*, 43(6), 1204–1224. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.05.002>
- Ombudsman RI. (2021). Problematika bantuan sosial dan DTKS. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--problematika-bantuan-sosial-dan-dtks>
- Program, P., Stimulan, B., Swadaya, P., Masyarakat, P., Lowulowu, K., Lealea, K., Baubau, K., & Hara, K. M. (2019). Pengaruh program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) pada masyarakat di Kelurahan Lowulowu Kecamatan Lealea Kota Baubau. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 5(2), 73–81. <https://doi.org/10.35326/PENCERAH.V5I2.541>
- Rulandari, N., Natision, A., Esien, E. B., & Kesmawan, A. P. (2022). The policy implementation of social ministry's cash assistance program during the COVID-19 pandemic in Jakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(1), 48–61. <https://doi.org/10.18196/JGPP.V9I1.13113>
- Saksono, H., Penelitian, B., & Kementerian, P. (2020). Literacy Hub (L-Hub): Studi strategi literasi pemerintah daerah (studi kasus di Kota Baubau). *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 105–118. <https://doi.org/10.47441/JKP.V15I1.124>
- Salsabila, N., Muna, N., Pradana, V. H., & Nurcahya, W. F. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–13. <https://doi.org/10.47134/JMSD.V1I4.317>
- Setiawan, A. R., & Nawangsari, E. R. (2023). Dynamic governance program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 92. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8176>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Taufiq, L. O. M., Andriani, R., & Nuriva, N. (2021). Perilaku ibu hamil dalam memilih tempat bersalin di wilayah kerja Puskesmas Sorawolio Kecamatan Sorawolio Kota Baubau. *Kampurui: Jurnal Kesehatan Masyarakat (The Journal of Public Health)*, 3(2), 69–74. <https://doi.org/10.55340/kjkm.v3i2.497>
- Xu, R., Yue, W., Wei, F., Yang, G., Chen, Y., & Pan, K. (2022). Inequality of public facilities between urban and rural areas and its driving factors in ten cities of China. *Scientific Reports*, 12(1), 1–14. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-17569-2>
- Zahimu, H. (2018). Evaluasi Program Indonesia Pintar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau tahun 2017. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 1(1), 37–46. <https://doi.org/10.35326/KYBERNAN.V2I1.469>
- Zakiah, N., Oktavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A. (2020). Efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak COVID-19 di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97.